

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA KANTOR PUSAT PT. BANK SULSELBAR

Mudjriah^{1*}, Fatmawati², Sitti Rahmawati Arfah³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the implementation of the National Economic Recovery program at the Head Office of PT. Bank Sulselbar using qualitative research methods, the number of informants is 10 people. The results of the research are 1) the program includes the realization of the distribution of PEN funds in phase I and phase II and the achievement of goals by implementing a program to increase the productive credit portfolio of the MSME segment. However, there were many obstacles that were passed, such as only new debtors, low purchasing power during the Covid-19 recovery, loan terms, declining economic growth, implementation of PSSB, business actors still observing economic growth conditions. 2) Implementing organizations consist of existing divisions designated in distribution and supported by complete facilities and infrastructure such as MSME Centers 3) Targets or parties to which PEN funds are provided consist of Services/Cooperatives, Industry, Infrastructure/Construction, Multi-Sector Productive, Financial/BPR and Other/Consumptive Intermediaries and how to act by making guidelines for the distribution of PEN funds Number SR/072/DRK/VIII/2021 and increasing the consumer credit portfolio, productive for the corporate and syndicated segments.

Keywords: *implementation, national economic recovery, development*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jumlah informan 10 orang. Hasil penelitian yaitu 1) program meliputi perealisasiian penyaluran dana PEN pada tahap I dan tahap II dan pencapaian tujuan dengan cara menjalankan program peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM. Namun banyak hambatan yang dilalui seperti hanya untuk debitur baru, daya beli rendah dimasa pemulihan Covid-19, jangka waktu pinjaman, turunnya pertumbuhan ekonomi, pemberlakuan PSSB, pelaku usaha masih mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi. 2) Organisasi pelaksana terdiri dari sudah ada divisi yang ditunjuk dalam penyaluran dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap seperti Sentra UMKM 3) Sasaran atau pihak-pihak yang diberikan dana PEN terdiri dari Jasa/Koperasi, Industri, Infrastruktur/ Konstruksi, Produktif Multi Sektor, Perantara Keuangan/BPR dan Lainnya/Konsumtif dan cara bertindak dengan membuat pedoman penyaluran dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/2021 dan dilakukan peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi.

Kata kunci: implementasi, pemulihan ekonomi nasional, pembangunan

* mudjriah@gmail.com

PENDAHULUAN

Dampak dari adanya Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan usaha penormalan kembali ekonomi Indonesia terkhusus kementerian keuangan yang perlu membentuk kebijakan mengenai mitigasi dampak Covid-19 dan terjadinya permasalahan perekonomian, adanya masalah tersebut maka dikeluarkan program yang disebut Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Semenjak dikeluarkan peraturan berupa peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 mengenai Komite penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dilihat dari peraturan ini semakin menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya dalam melakukan penanganan pandemi yang terjadi. Pemerintah melakukan pengatisipasian dengan melakukan penggabungan masalah yang multidimensional diakibatkan dari COVID-19 terdiri dari masalah Kesehatan dan masalah ekonomi. Diharapkan dengan penggabungan ini maka Covid-19 dan pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat ditangani dan lebih cepat pastinya.

Akibat dari Covid-19 maka untuk melakukan pemulihan, banyak kebijakan yang dikeluarkan agar kondisi menjadi stabil, maka pemerintah dan masyarakat

memerlukan implementasi ataupun formula yang efektif. Adanya implementasi pemerintah sebagai bentuk dari buah pemikiran yang terus melakukan pengupayaan melihat masalah yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat bisa dikembangkan lebih muda, pemerintahpun dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan peningkatan potensinya dan membuka peluang perekonomian.

Perlunya melakukan implementasi untuk menciptakan tujuan yang unggul, dikarenakan dalam melakukan proses implementasi yang di dalamnya terdapat tahapan yang paling penting sebagai proses pelaksanaan program. Ketika terjadi kesalahan dalam melakukan implementasi bisa berakibat memberikan kesalahan pada organisasi. Ketika organisasi melakukan implementasi dari visi, misi dan tujuan serta nilai yang menjadi dasar organisasi maka disitu pula terjadi peningkatan visi dan misi yang pastinya akan menentukan keberhasilan organisasi di masa depan nantinya.

Implementasi kebijakan sebagai tahapan sangat penting untuk semua struktur dari semua kebijakan. Tahapan ini akan mampu memberikan tentang apakah kebijakan bisa membantu pemerintah dan benar suda bisa aplikabel

ketika dilakukan di lapangan yang pada akhirnya mampu memberikan *output* dan *outcomes* yang telah direncanakan. Sehingga ada *output* dan *outcomes* yang sudah ditetapkan diawal. Sehingga kebijakan harus ada pengimplementasiannya dan ketika tidak dilakukan pengimplementasian maka akan hanya menjadi catatan elit saja (Djabier, 2015). Tujuan kebijakan publik, menurut Hallsworth, Parker dan Rutter dalam Kusuma (2022) terdiri dari dua tahap yaitu langkah formulasi dan langkah penetapan kebijakan

Agar bisa dapat mencapai tujuan maka dibutuhkan kerjasama dengan para ahli pada bidangnya atau harus ada penggerak dari seorang pemimpin sebagai penggerak dan pengkoordinir dari semua unsur-unsur yang berada pada bawahnya sehingga dapat capai tujuannya (Rohman, 2020).

Dilihat dari implementasi tentang Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sagulung Kota Batam dikaji oleh Nurmalasari et al., (2022) yang memperlihatkan bahwa dari semua interpretasi yang dilakukan maka menurut Edward ada empat dimensi dari implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Ketika semua itu terpenuhi maka program bisa berjalan dengan efektif.

Implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn dalam Lestari & Arumsari (2021) menjelaskan bahwa implementasi menjadi sebuah tindakan-tindakan yang harus dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang berkaitan ataupun pejabat yang berkaitan ataupun kelompok, pemerintah ataupun swasta yang pengarahannya agar capai tujuan yang sudah dibuat disetiap kebijakan.

Adapun elemen-elemen utama dari model implementasi David C. Korten dalam Akib & Tarigan (2008) bahwa ada tiga elemen yang disebut dengan kesesuaian dengan pendekatan yang disebut pendekatan proses pembelajaran yang dititikberatkan pada ketiga elemen yaitu program, pelaksanaan program dan sasaran dari program.

Menurut Wahab (2012) semua keputusan-keputusan mengenai kebijakan pasti memiliki banyak rentetan proses baik administrasi atau adanya tahap birokrasi maupun politik yang memang rumit tetapi akan menggerakkan keseluruhan instansi atau pemerintah yang memiliki kaitan. Seperti halnya dengan penormalan ekonomi pada masa pademi ini.

Terdapat tahapan siklus implementasi kebijakan publik menurut Thoha dalam Ramdhani & Ramdhani (2017) yaitu kebijakan adalah sebuah praktika sosial dan kebijakan merupakan

respon terhadap peristiwa yang terjadi.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penormalan ekonomi tidak bisa lepas dari peran sektor perbankan yang pada saat ini terus berkembang pesat dan pastinya dapat menunjang perekonomian nasional yang memiliki peranan besar dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Menurut Lover dalam Simatupang (2019), industri perbankan selalu dianggap menjadi motor penggerak ekonomi dan jantung dari perekonomian negara. Dilihat dari peranannya, perbankan memiliki strategi selaku *intermediary institution* untuk menghimpun dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian, hal itu membuat struktur perekonomian negara menjadi kuat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank sebagai sebuah badan usaha yang memiliki tugas dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan dan melaksanakan penyaluran kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau bentuk lainnya guna peningkatan taraf hidup semua rakyat. Menurut *Dictionary of Banking and Services* by Jerry Rosenbag dalam Hamid (2017), bahwa Bank yaitu lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan simpanan yang

berbentuk giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang ditarik pada satu orang atau lembaga, mendiskonto surat berharga, melakukan pemberian pinjaman dan melakukan penanaman dana dalam surat berharga.

Secara garis besar, menurut Gill dalam Simatupang (2019) jika dilihat peranan perbankan dalam perekonomian yaitu: pertama, memiliki fungsi sebagai (*transmission function*) sehingga perbankan dituntut untuk menjalankan fungsinya. Kedua, memiliki fungsi (*intermediation function*) melakukan penyaluran dan menghimpun dana, ketiga memiliki fungsi (*transformation and distribution of risk function*) yaitu melakukan pengtransformasian dan pendistribusian risiko di dalam perekonomian, keempat berperan sebagai (*stabilization function*). yaitu sebagai instrument dalam melakukan atau menstabilkan kondisi perekonomian.

Menurut Sunarsip dalam Simatupang (2019), adanya industri perbankan sangat penting terkhusus di Indonesia sebagai negara berkembang. Dikarenakan tipe dari negara berkembang ini memiliki karakteristik *saving-investment gap* atau ada dana yang pada akhirnya pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menutupinya. Pembangunan ekonomi

yang dilakukan memerlukan keterlibatan dari perbankan untuk melakukan pengumpulan dan menyalurkan lagi dana masyarakat. Perbandingan di negara maju berbeda dengan perbankan di negara berkembang yang lebih mendominasi, sehingga perbankan di daerah berkembang sangat memiliki peran yang strategis.

Adanya program yang dikeluarkan pemerintah yaitu program pemulihan ekonomi nasional ini yang salah satu lembaga yang memiliki peran yaitu perbankan seperti PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar atau Bank Sulselbar. Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan tentang stabilitas sistem keuangan dalam melakukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi perekonomian dari ancaman yang berbahaya dan untuk menjaga kestabilan keuangan. Peraturan yang dibentuk ini maka dikeluarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana PEN. Adanya peraturan yang dikeluarkan maka dijadikan pedoman guna mendukung kebijakan keuangan negara dalam melakukan penanganan pandemic

corona dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Lembaga perbankan yang memberikan dukungannya terhadap dunia usaha seperti UMKM, BUMN dan juga Korporasi.

Bank Sulselbar sebagai salah satu perbankan yang menerima dana pemulihan ekonomi nasional, untuk bisa mencapai tujuan dan keberhasilan program ini maka bank Sulselbar memiliki strategi yaitu melakukan program peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi, antara lain: 1). Bank telah mengambil kebijakan dengan penurunan suku bunga kredit konsumtif dari suku bunga 12% menjadi 11% dan suku bunga produktif (KMK dan KI dari 13%-15% menjadi 10%-12%, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank agar lebih kompetitif dengan bank lain, 2). Menjalin hubungan dengan bank-bank himbara dalam rangka pembiayaan secara sindikasi, 3). Melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha besar dan korporasi yang ada di daerah/wilayah kerja Bank Sulselbar untuk memberikan penawaran *take over kredit*/pembiayaan dengan penawaran *rate* suku bunga yang lebih rendah/*negotiable*.

Strategi perbankan dalam menghadapi persaingan bisnis pernah

dikaji oleh Januario (2017), pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya yang menunjukkan bahwa dalam prakteknya setiap lembaga keuangan memiliki macam-macam strategi, strategi tersebut terbagi menjadi tiga yaitu: (1) Strategi perusahaan yaitu strategi yang disusun pada puncak organisasi yang menyatakan bisnis-bisnis apa yang akan masuk oleh suatu organisasi (perbankan); (2) Strategi bisnis yaitu strategi yang memfokuskan bagaimana bersaing dalam suatu bisnis tertentu; (3) Strategi fungsional yaitu berfokus pada jangka pendek, mempunyai perhatian terhadap sub-aktivitas fungsional (operasi keuangan, pemasaran, sumber daya dan lain-lain).

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar merupakan salah satu dari jasa-jasa perbankan yang ada di Sulawesi Selatan. Menjadi Bank yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik. Bank Sulselbar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dukungan ini jelas diwujudkan dengan memacu penyaluran pinjaman modal kepada pelaku UMKM yang telah terdampak pandemi Covid-19, serta penurunan suku bunga kredit konsumtif dan produktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar dalam kontribusinya pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional memiliki beberapa program khusus antara lain: 1). Meningkatkan portofolio kredit produktif segmen UMKM yaitu dengan penyaluran kredit dengan dana CSR untuk pelaku UMKM, 2). Pembentukan kantor cabang khusus UMKM, Bank Sulselbar akan membentuk lima unit kantor cabang menjadi Pilot Project untuk menjadi cabang khusus UMKM, dimana penetapan kantor cabang ini akan ditetapkan berdasarkan potensi Daerah masing-masing, 3). Menjalin kerja sama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Adapun sasaran/target dari program pemulihan ekonomi nasional pada PT. Bank Sulselbar bahwa penempatan dana PEN sebesar Rp. 1 triliun untuk tahap pertama dengan realisasi sampai posisi Maret 2021, berjalan cukup baik yang telah direalisasikan ke sektor produktif baik UMKM, konstruksi, industri dan jasa lainnya dengan rasio *leverage* sebesar dua kali lipat atau sebesar Rp. 2 Triliun yang dimana total penyaluran kredit dengan menggunakan dana PEN yang dimulai bulan Oktober 2020 s/d Maret 2021 atau selama (6 bulan) sebesar Rp. 2,324 Triliun, atau sebesar 64% di

peruntukkan pada kredit konsumtif dan kredit produktif sebesar 36% dengan total debitur 12,302 atau telah mencapai dari target yang diberikan.

Untuk tahap kedua posisi Januari 2021 total penyaluran sebesar 1,132 triliun dimulai bulan April s/d Januari atau selama 3 bulan sebesar sebesar 61% di peruntukkan pada kredit konsumtif dan kredit produktif sebesar 39% dengan total debitur 6,734 dengan menyisahkan 3 bulan lagi dari target penyaluran s/d bulan Oktober 2021. Sasaran utama sesuai dengan target yang diberikan DJPP atau Kementerian keuangan di salurkan ke enam sektor yaitu: Jasa/Koperasi, Industri, Infrastruktur/Konstruksi, Produktif Murni, Perantara Keuangan/BPR dan lainnya.

Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terdapat permasalahan dihadapi oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar yaitu harus mendorong dan menumbuhkan permintaan kredit. Selain itu masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk mengajukan permohonan, hal ini menyebabkan bank sulit untuk mendeteksi pelaku usaha yang membutuhkan insentif dana dalam program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing* di tengah masyarakat mengakibatkan

sulitnya pemasaran kredit serta masyarakat masih trauma atau takut untuk melakukan kontak secara langsung dengan pihak Bank.

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar”.

METODE

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar yang beralamatkan Jl. Dr. Ratulangi No. 16, Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kode Pos 90114. Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian karena peneliti melihat kenyataan di lapangan bahwa Bank Sulselbar telah turut andil dalam program pemulihan ekonomi nasional yang tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh proses implementasi yang dijalankan oleh Bank Sulselbar. Namun kenyataannya tidak semua implementasi dapat dijalankan dengan mulus karena terkendala berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan jenis dari penelitian ini fokus pada penalaran, pendefinisian dari situasi yang terjadi.

Untuk itu, dalam Menyusun data penelitian kualitatif harus disesuaikan terhadap fakta-fakta yang sudah ditemui di lokasi. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016) dalam metode kualitatif berlandas pada filsafat postpositivisme sehingga instrumen kunci penelitian yaitu peneliti sendiri.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sekunder. Adapun informan dari penelitian ini yaitu terdiri dari Pihak Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar dan Pemilik UMKM.

Teknik Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Hariyanti (2015), yang terdiri dari. Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*) dan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

Teknik pengabsahan data terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi Teknik triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada poin hasil penelitian, berikut akan dibahas.

Program

Program Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari perealisasi dan pencapaian tujuan yang dilakukan dalam sebuah misi yang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar untuk mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar meliputi.

Perealisasi Penyaluran Dana PEN Pada Tahap I dan Tahap II

Pelaksanaan program Program Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari realisasi penempatan dana PEN, target penggunaan dana PEN dan realisasi penyaluran dana PEN, berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 1.
Realisasi Penempatan Dana PEN Tahap I

Tahap 1								
Perjanjian Kemitraan Bank dengan DJPb		Realisasi Penempatan Dana						
Nomor	Tanggal	Bentuk (Deposito /Giro)	Nomor (Deposito/ Giro)	Tanggal	Jumlah	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ Imbal Jasa
359/PKS-BSSB/IX/20 & PRJ-258/PB/2020	22-Sep-20	Deposito	B039780	02-Oct-20	1.000.000.000.000	6 Bulan	02-Apr-21	2,84%

Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, (2022)

Tahap realisasi penempatan dana PEN tahap I yang berjumlah 1.000.000.000.000 untuk jangka waktu penyaluran yaitu 6 bulan lamanya. Setelah dilakukan perealisasi penempatan dana untuk tahap I kemudian penentuan target penggunaan tahap I berjumlah 2.000.000.000.000,00 yang setiap penempatannya memiliki sasarannya masing-masing untuk jasa/koperasi, industri, infrastruktur/ konstruksi, produktif multi sektor, perantara keuangan/BPR, lainnya/konsumtif.

Realisasi penempatan dana PEN tahap II berjumlah 1.000.000.000.000. Setelah dilakukan perealisasi penempatan dana tahap II kemudian penentuan target penggunaan dana yaitu 1.500.000.000.000,00 yang setiap penempatannya memiliki sasarannya masing-masing untuk jasa/koperasi, industri, infrastruktur/ konstruksi, produktif multi sektor, perantara keuangan/BPR, lainnya/konsumtif, berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 2.
Realisasi Penempatan Dana PEN Tahap 2

Tahap 2								
Perjanjian Kemitraan Bank dengan DJPb		Realisasi Penempatan Dana						
Nomor	Tanggal	Bentuk (Deposito/ Giro)	Nomor (Deposito /Giro)	Tanggal	Jumlah	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ Imbal Jasa
146/PK S-BSSB/II I/2021 & PRJ-268/PB/2021	30-Mar-21	Deposito	B042191	01-Apr-21	1.000.000.000.000	6 Bulan	01-Oct-21	2,84%

Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, (2022)

Setelah melakukan penetapan penggunaan dana PEN, maka selanjutnya realisasi penyaluran dana PEN yang setiap tahapan berbeda. Tahap I berjumlah yaitu 2.027.278.491.981,00. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap I

Target Penggunaan Dana PEN Tahap I		Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap I			
Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	NOA	Capaian	Ket
Jasa/Koperasi	40.000.000.000,00	48.978.500.000,00	295	122,45%	Posisi Maret 2021
Industri	200.000.000.000,00	114.167.000.000,00	95	57,08%	
Infrastruktur/ Konstruksi	351.000.000.000,00	131.524.835.002,00	236	37,47%	
Produktif Multi Sektor	274.000.000.000,00	232.443.040.000,00	2151	84,83%	
Perantara Keuangan/BPR	150.000.000.000,00	200.000.000.000,00	2	133,33%	
Lainnya/Konsumtif	985.000.000.000,00	1.300.165.116.979,00	9523	132,00%	
TOTAL	2.000.000.000.000,00	2.027.278.491.981,00	12.302	101,36%	

Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, (2022)

Sedangkan realisasi penyaluran dana PEN tahap II yaitu 1.850.533.380.522,00. Sasaran Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar. Untuk Lainnya/Konsumtif yang paling banyak

yaitu 871.966.002.369,00 dan yang terendah yaitu jasa koperasi berjumlah 97.181.620.000,00 berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 4
Target dan Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap II

Target Penggunaan Dana PEN Tahap II		Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap II			
Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	NOA	Capaian	Ket
Jasa/Koperasi	50.000.000.000,00	97.181.620.000,00	240	194,36%	Posisi September 2021
Industri	100.000.000.000,00	75.290.000.000,00	81	75,29%	
Infrastruktur/ Konstruksi	150.000.000.000,00	517.774.058.153,00	753	345,18%	
Produktif Multi Sektor	150.000.000.000,00	162.845.700.000,00	1413	108,56%	
Perantara Keuangan/BPR	50.000.000.000,00	125.476.000.000,00	4	250,95%	
Lainnya/Konsumtif	1.000.000.000.000,00	871.966.002.369,00	7342	87,20,00%	
TOTAL	1.500.000.000.000,00	1.850.533.380.522,00	9,833	123,37%	

Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, (2022)

Dalam melakukan penetapan jumlah dana yang dilakukan sangat diperlukan kehati-hatian, transparan dan penuh perhitungan supaya penetapan dana sesuai yang dialokasikan dan ketiak realisasi sesuai dengan penetapan dana.

Tingkat Pencapaian Tujuan dari Program Pemulihan Ekonomi

Program yang baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya. Maka dari itu untuk mengukur

keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar bisa dilihat dari pencapaian tujuan.

Tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar sudah tercapai, terdapat program khusus sebagai salah satu strategi yang dilakukan yaitu peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM terdiri dari 1) Bank Sulselbar akan menyalurkan kredit dengan sumber dana CSR. Bank Sulselbar akan menyalurkan kredit dengan sumber dana CSR, sehingga pembebanan suku bunga dapat diberikan serendah mungkin. Kredit dengan dana CSR tersebut akan disalurkan dengan mekanisme bergulir, sehingga diharapkan akan banyak para pelaku UMKM yang menerima dan menikmati fasilitas kredit ini. 2) Pembentukan Kantor Cabang Khusus UMKM, Bank Sulselbar akan membentuk 5 (lima) unit Kantor Cabang menjadi *Pilot Project* untuk menjadi cabang khusus UMKM. Penetapan kantor cabang ini akan ditetapkan berdasarkan potensi daerah masing masing. 3) Kerjasama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Bank Sulselbar akan melakukan inisiasi kerjasama dengan BUMDES diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Barat untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di pedesaan yang membutuhkan akses keuangan baik itu dari sisi permodalan maupun penghimpunan dana.

Penerima Program Pemulihan Ekonomi Nasional sangat bermanfaat, sebagai bantuan modal dalam membuka usaha. Sehingga tujuan dari PEN ini salah satunya diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM serta meningkatkan kinerja UMKM yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian.

Namun, untuk mencapai tujuan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar terdapat hambatan-hambatan yang dilalui seperti 1) Penyaluran kredit hanya di peruntukkan pada debitur baru, sehingga pencapaian target sedikit lebih terlambat terpenuhi dikarenakan penyaluran dana tidak dapat diberikan lagi kepada debitur *existing*. 2) Daya beli masyarakat yang masih rendah dimasa pemulihan Covid-19 sehingga pelaku usaha masih ragu untuk memulai kembali usahanya mengakibatkan turunnya permohonan kredit usaha/produktif pada Bank. 3) Jangka waktu pinjaman Dana PEN hanya 6

bulan sementara jangka waktu pemberian kredit khusus UMKM rata-rata dikisaran 3 tahun sehingga Bank lebih selektif dalam penyaluran kredit kepada para pelaku UMKM. 4) Adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah Provinsi Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan kredit menurun drastis. 5) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) di beberapa wilayah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat berimbas pada ditutupnya toko-toko atau usaha para pelaku UMKM yang mengakibatkan turunnya omzet usaha baik dari segi penjualan maupun produksi. 6) Diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing* di tengah masyarakat sehingga mengakibatkan sulitnya pemasaran kredit serta masyarakat masih trauma atau takut untuk melakukan kontak secara langsung dengan pihak Bank. 7) Masih banyak pelaku usaha yang masih mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan akan memulai kembali kegiatan usahanya bila dianggap kondisinya memungkinkan.

Itulah yang menjadi penghambat terealisasinya program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, hambatan tersebut bukan berarti bisa menggagalkan penyuksesan program ini. Banyak Langkah atau strategi Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar yang disusun demi tercapainya tujuan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Organisasi Pelaksana

Dalam melaksanakan penyaluran dana PEN berikut beberapa hal yang dilakukan.

Divisi yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam melaksanakan penyaluran dana PEN ini ada beberapa divisi yang sudah diatur dan ditugaskan serta bertanggung jawab dalam kesuksesan penyaluran dana kepada pihak sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun divisi-divisi yang terlibat dari hasil data yang didapatkan selama penelitian yaitu 1) DIR (Divisi Trisuri), 2) Divisi Ritel & Konsumen, 3) Divisi Syariah, 4) Divisi Informasi Teknologi, 4) Divisi Pengendali Keuangan, 5) Divisi Manajemen Risiko.

Dari hasil observasi setelah ditunjuk divisi yang menangani, dalam penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional maka Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar membentuk tim penempatan dana PEN. Berikut pedoman Penyaluran Dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/202

Implementasi penyaluran dana PEN di dukung dengan adanya divisi-divisi yang sudah ditunjuk langsung, maka diharapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah disepakati bersama dan mampu menggerakkan kembali perekonomian.

Sarana dan Prasarana Pendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sarana dan prasarana merupakan adalah perlengkapan atau alat yang dapat atau yang bisa digunakan oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar sebagai peralatan dan bahan untuk mencapai tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sarana dalam hal ini meliputi kantor cabang khusus UMKM, sosial media, komputer dan sarana lain yang mendukung kelancaran Program PEN di Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar.

Sarana dan prasarana yang digunakan Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional sudah lengkap yang terdiri kantor cabang, fasilitas yang ada di Kantor cabang, Sosial media, penggunaan media massa untuk menyebarkan informasi tentang proses dan perkembangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar.

Sarana juga diperlukan UMKM agar bisa berkembang dan berkompetitif dengan pasar yang terus maju maka PT. Bank Sulselbar menggunakan strategi dengan membentuk Sentra UMKM untuk memberdayakan kelompok usaha dan membina UMKM yang diharapkan bisa bersinergi. Sentra UMKM ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra UMKM PT. Bank Sulselbar dengan nomor surat SK/DIR:SK/DIR/I/2022, pada halaman: 3 yang menjelaskan PT. Bank Sulselbar membentuk Sentra UMKM dengan maksud untuk memberikan team khusus untuk pelaku UMKM dengan tujuan sebagai berikut: 1) Memberikan edukasi, literasi dan inklusi keuangan kepada para pelaku UMKM. 2) Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh informasi perbankan bagi UMKM; 3) Membantu para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usaha di tengah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi riil secara berkelanjutan. 4)

Memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang feasible namun belum *bankable*. 5) Membantu pelaku UMKM untuk menaikkan kelasnya (*Scale Up*). 6) Mengurangi praktek rentenir. 7) Meningkatkan portofolio kredit produktif skala UMKM dan peningkatan jumlah pemasangan QRIS bagi pelaku UMKM. 8) Sebagai sarana/display bagi pelaku UMKM untuk memajang produk jualannya. 9) Sebagai sarana untuk mengadakan pelatihan bidang tertentu bagi pelaku UMKM.

Sehingga dengan adanya Sentra UMKM ini para pelaku UMKM bukan hanya dibantu dari segi finansial melainkan dibantu dari segi edukasi, peningkatan kualitas produk yang dipasarkan. Dalam proses implementasi sarana dan prasarana sangat diperlukan karena merupakan salah satu faktor pendukung dari implementasi.

Sasaran

Indikator ini menjelaskan beberapa sub indikator dari sasaran dalam implementasi penyaluran dana PEN sebagai berikut.

Sasaran atau Pihak-Pihak yang Diberikan Dana PEN

Proses implementasi program PEN tidak lepas dari penentuan

dan penetapan sasaran yang terdiri dari 1) Jasa/Koperasi, 2) Industri, 3) Infrastruktur/ Konstruksi, 4) Produktif Multi Sektor, 5) Perantara Keuangan/BPR, 6) Lainnya/Konsumtif.

Sasaran penyaluran dana PEN sudah disalurkan sesuai dengan kebijakan dari Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar melebihi angka 100 %. Penyaluran untuk setiap target mencapai angka (%) untuk setiap sasaran berbeda-beda dan total keseluruhan 101,36% untuk tahap I dan 123,37 % untuk tahap II. Persentase ini melebihi angka 100 %. NOA atau *Number of Account* yaitu jumlah rekening penyaluran dana PEN yang tercatat di Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar untuk tahap I berjumlah 12.302 dan tahap II yaitu 9.833 yang lebih rendah dibandingkan tahap I.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada saat sedang terjadi pandemi Covid-19 dan kepercayaan dari masyarakat terhadap bank semakin meningkat.

Salah satu fungsi dari bank yaitu *Agen of trust* yang merupakan dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), sehingga dengan adanya program ini mampu memberikan citra yang baik bagi sebuah bank terkhusus Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar.

Cara Bertindak Dari PT. Bank Sulselbar Dalam Mencapai Sasaran/Target Program PEN

Cara bertindak merupakan cara yang telah dipikirkan secara matang oleh Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar yang dilakukan demi tercapainya tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Terdapat dua hal penting dalam sebuah metode yaitu cara dalam melakukan sesuatu dan sebuah rencana dalam pelaksanaannya. *Ways* berupa cara bertindak dari PT. Bank Sulselbar dalam mencapai sasaran/target Program PEN.

Langkah implementasi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dengan menindaklanjuti risalah rapat Oritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

RR- 9/ KR.061/2021 tanggal 09 Juli 2021 Agenda Perkembangan Penyaluran Dana PEN Tahap II dengan membuat pedoman singkat penyaluran dana PEN yaitu Pedoman Penyaluran Dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/2021. Tujuan pembentukan yaitu memudahkan koordinasi terkait dengan data-data yang diperlukan selama proses penempatan dan penyaluran dana PEN. Sasaran kerja untuk kelancaran dan percepatan proses penempatan dan proses penyaluran dana PEN PT. Bank Sulselbar.

Implementasi yang dilakukan demi tercapainya tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi yang terdiri dari 1) Bank telah mengambil kebijakan berupa penurunan suku bunga kredit konsumtif dari suku bunga 12% menjadi 11% dan suku bunga produktif (KMK dan KI) dari 13%-15% menjadi 10%-12%. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 5
Suku Bunga Sebelum Dana PEN

No	Uraian	Sebelum Dana PEN		Sesudah Dana PEN	
		Suku Bunga	Surat Edaran Direksi	Suku Bunga	Surat Edaran Direksi
1	Kredit Umum Lainnya (KUL)	12 %	SE/062/DIR/K/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020	11 %	SE/062/DIR/K/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020
2	Kredit Pensiun	12 %		11 %	

3	Kredit Pegawai ASN Pra Pensiun	12 %		11 %	
4	Kredit DPRD	12 %		11 %	
5	Kredit Multiguna Plus	13 %		12 %	
6	Kredit Usaha Mandiri (KUM)	11,50 %		11 %	
7	Kredit Investasi Biasa (KIB)	13-15 %		10-12 %	
8	Kredit Modal Kerja (KMK)	13-15 %		10-12 %	
9	Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)	15 %		6 %	
10	Kredit Usaha Mandiri (KUM)	11 %	SE/002/DIR/K/I/2021 Tanggal 29 Januari 2021	10 %	SE/002/DIR/K/I/2021 Tanggal 29 Januari 2021

Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, (2022)

Hal ini diharapkan dapat menaikkan daya saing bank agar lebih kompetitif dengan bank lain. Diharapkan dengan penurunan ini mampu memberikan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi sehingga dampak pandemi berkurang apalagi untuk pelaku usaha. 2) Menjalin hubungan dengan bank-bank himbara atau Bank Milik Negara dalam rangka pembiayaan secara sindikasi. Bank Sulselbar melakukan ini tujuannya dalam rangka memperkuat struktur dari program PEN. Dengan adanya kerja sama dengan bank Himbara bisa dilihat bahwa pada saat ini seluruh pihak bahu membahu untuk membantu para pelaku usaha. Salah satu contoh yaitu Bank Sulselbar turut berpartisipasi dengan memberikan kredit sindikasi kepada PT Ceria Metalindo Prima untuk keperluan investasi proyek strategis Nasional. 3) Melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha besar dan korporasi yang

ada di daerah/wilayah kerja Bank Sulselbar untuk memberikan penawaran take over kredit/pembiayaan dengan penawaran rate suku bunga yang lebih rendah/*negotiable*. Pada saat ini banyak para pelaku usaha yang masih berfikir untuk mengambil kredit diakibatkan pandemi yang bisa berimbas pada tingkat pendapatan pelaku usaha, dengan adanya bunga rendah yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar melalui pendekatan khusus sehingga program ini dirasakan oleh semua pelaku usaha.

Dari ketiga cara yang dilakukan dalam pengimplementasian tersebut yang dirasa paling efektif untuk mencapai keberhasilan dari program pemulihan ekonomi nasional yaitu penurunan bunga kredit konsumtif dan produktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya program dana PEN maka suku bunga yang digunakan ikut menurun. Hal ini menyebabkan implementasi yang

diberlakukan adalah cara paling efektif untuk mencapai keberhasilan implementasi dari program pemulihan ekonomi nasional.

Cara efektif atau terobosan baru dalam sebuah kebijakan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicanangkan. Sesuai dengan tujuan dari program dana PEN yaitu melakukan perlindungan, mempertahankan dan peningkatan kempuan perekonomian dari para pelaku usaha yang sedang menjalankan usaha di tengah pandemi saat ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut 1) Program meliputi perealisasi penyaluran dana PEN pada tahap I dan tahap II sudah terealisasi dan tingkat pencapaian tujuan dari program Program Pemulihan Ekonomi sudah tercapai dengan menjalankan program khusus yaitu peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM. Namun banyak hambatan yang dilalui seperti penyaluran kredit hanya di peruntukkan pada debitur baru, daya beli masyarakat yang masih rendah dimasa pemulihan Covid-19, jangka waktu pinjaman dana PEN hanya 6 bulan, turunnya pertumbuhan ekonomi, pemberlakuan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing*, masih banyak pelaku usaha yang masih mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. 2) Organisasi Pelaksana terdiri dari sudah ada divis yang ditunjuk dalam penyaluran dana PEN yang dalam penyalurannya didukung oleh Sarana dan prasarana yang sudah lengkap yang terdiri kantor cabang, fasilitas yang ada di Kantor cabang, Sosial media, penggunaan media massa untuk menyebarkan informasi dan salah satu dilakukan dengan membetuk Sentra UMKM untuk memberdayakan kelompok usaha dan membina UMKM yang diharapkan bisa bersinergi. 3) Sasaran atau pihak-pihak yang diberikan dana PEN terdiri dari Jasa/Koperasi, Industri, Infrastruktur/Konstruksi, Produktif Multi Sektor, Perantara Keuangan/BPR dan Lainnya/Konsuntif dan cara bertindak dari PT. Bank Sulselbar dalam mencapai sasaran/target Program PEN dengan membuat pedoman penyaluran dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/2021. Cara yang dilakukan demi tercapainya tujuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1–11.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Kebijakan Publik*, 1(1), pp. 1–19. <https://scholar.google.co.id/citations?user=xgg8yZ8AAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2021). *Kota Makassar Dalam Angka* (Andriani (ed.)). Makassar: BPS Kota Makassar.
- Djabier, Y. S. (2015). Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu. *Katalogis*, 3(11), pp. 51–60. <https://doi.org/2302-2019>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); 1st ed.). Semarang: Widya Karya.
- Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Implementasi Insentif Menurut Model G Edward III. *Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), pp. 236–248.
- Lestari, N. A., & Arumsari, N. (2021). Implementasi Program Desa Online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (Si Dokar) di Tiga Desa Kabupaten Kendal. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), pp. 6–10. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.44551>
- Nata, M. A. D., & Haryono, A. (2022). Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Digital untuk Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi Covid 19. *Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 10(1), pp. 38–47.
- Nurmalasari, I., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2022). Implementasi Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Student Online Journal*, 3(1), pp. 50–63.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 11(1), pp. 1–12. <https://doi.org/1412-7083>
- Rohman, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 2(1), pp. 30–36. <https://doi.org/2087-15111>
- Situmorang, C. H. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Social and Government*, 1, xii + 324.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Fungsi Bank di Indonesia*
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.